

# GERAKAN SIMBOLIK KULTURAL MASYARAKAT ADAT SENGWER MERESPON MARGINALISASI TERKAIT PENERAPAN PROGRAM NRMP DI CHERANGANY HILLS, KENYA

I Wayan Widyartha Suryawan<sup>1)</sup>, Idin Fasisaka<sup>2)</sup>, Anak Agung Ayu Intan Parameswari<sup>3)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: widyarthasuryawan@gmail.com<sup>1)</sup>, idinfasisaka@yahoo.co.id<sup>2)</sup>,

prameswari.intan@gmail.com<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Natural Resource Management Project (NRMP) which is the domestic derivative of global conservation schemes Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), has led to the marginalization of Sengwer indigenous peoples in Cherangany Hills, Kenya. The Government of Kenya and the World Bank as the funders have violated the constitutional rights of Sengwer indigenous peoples. Responding to the marginalization, cultural symbolic movement emerged which put forward the concept of indigenous community-based conservation. Symbolic cultural movement is a form of new social movements. This movement seeks to fight for the rights of Sengwer who are victims by application of the NRMP in Cherangany Hills, Kenya. This study aims to look at the symbolic cultural movement of indigenous peoples which is often regarded as a static society, a role responding to global conservation discourse. This study assessed using the concept of indigenous peoples and symbolic cultural movements; developmentalism; marginalization due to development; and theories of political ecology in developing countries.*

**Keywords: symbolic cultural movement, marginalization, indigenous peoples, political ecology**

## 1. PENDAHULUAN

Ribuan masyarakat adat Sengwer di Cherangany Hills, Kenya telah menjadi korban penggusuran paksa dari program *Natural Resource Management Project* (NRMP). Dari tahun 2011 sampai 2014, program ini menyebabkan ribuan rumah warga Sengwer dibakar oleh *Kenya Forest Service*, sebuah departemen di bawah pemerintah Kenya (no-redd-africa.org). Bahkan, keberadaan masyarakat adat Sengwer telah dinyatakan dalam keadaan yang termarginalisasi akibat penerapan program NRMP sejak Maret 2007 (FPP, 2014).

NRMP adalah program turunan atau penjabaran domestik dari skema global *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD). Tujuan dari

program NRMP yaitu peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya air dan hutan; menjaga tangkapan air di sungai sebagai upaya mengantisipasi bencana alam; dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air dan hutan. Akan tetapi, tujuan-tujuan tersebut justru menimbulkan perbedaan konsep konservasi global (REDD melalui NRMP) dengan konsep konservasi masyarakat di sekitar Cherangany Hills, Kenya.

Kasus penggusuran dan pembakaran pemukiman komunitas adat Sengwer di Kenya telah menunjukkan hak-hak masyarakat lokal untuk memanfaatkan hutan berbenturan dengan tujuan masyarakat internasional dalam menerapkan program REDD. Menurut laporan *Survival International* (2013) – sebuah LSM Internasional yang bergerak untuk masyarakat

adat, juru bicara Sengwer yaitu Yator Kiptum telah menekankan bahwa Cherangany adalah tanah komunal Sengwer, karena pemerintah Kenya sendiri sudah mengakui tersebut di masa lalu. Penggusuran itu dilakukan pemerintah Kenya dengan mengubah batas lahan konservasi tanpa kompromi terlebih dahulu dengan masyarakat sekitar. Dengan alasan konservasi, masyarakat adat di hutan Cherangany yang sudah lama menetap di sana pun harus tunduk pada penggusuran. Pemerintah Kenya juga tidak mengindahkan hasil persidangan di pengadilan tinggi di Eldoret, Kenya pada tahun 2013. Persidangan tersebut memerintahkan agar penggusuran dan pembakaran rumah masyarakat adat Sengwer segera dihentikan. Akan tetapi, pemerintah Kenya mengabaikan putusan tersebut. Pemerintah Kenya bahkan menyebut komunitas Sengwer yang tinggal bertahun-tahun di hutan Cherangany sebagai masyarakat liar – sehingga layak untuk digusur.

Menyikapi marginalisasi akibat penerapan program NRMP tersebut, masyarakat adat Sengwer mulai bereaksi dengan melakukan pergerakan-pergerakan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai masyarakat adat. Gerakan yang dilakukan masyarakat adat Sengwer tersebut merupakan salah satu bentuk Gerakan Sosial Baru, yaitu melalui gerakan simbolik kultural. Gerakan simbolik kultural masyarakat adat Sengwer menarik dibahas lebih lanjut terutama karena dua hal. *Pertama*, isu ekologi, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim dan deforestasi selalu menjadi perhatian dominan dalam forum-forum internasional. Dalam Protokol Kyoto misalnya diatur negara-negara maju wajib mengurangi emisi dengan rata-rata sebesar 5% dari emisi tahun 1990, yaitu antara tahun 2008 sampai 2012 (Wardojo dalam Masripatin, 2007). Akan tetapi, program konservasi REDD melalui NRMP justru mengakibatkan terjadinya marginalisasi terhadap masyarakat adat Sengwer di Cherangany Hills di Kenya yang merupakan negara berkembang.

*Kedua*, NRMP sebagai penjabaran domestik dari program konservasi global REDD tidak memperhatikan hak-hak masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat adat Sengwer di Cherangany Hills. Dalam laporan NRAN (2013), pelaksanaan program tersebut sudah mengarah

pada pelanggaran HAM berat, karena mengancam kelangsungan hidup budaya masyarakat adat. Terlebih lagi, komunitas adat Sengwer merupakan kelompok masyarakat pemburu-pengumpul (*hunter-gatherer*) yang sejak turun-temurun bergantung dan hidup berkesinambungan dari hutan. Berangkat dari itulah, gerakan simbolik kultural masyarakat adat Sengwer di Cherangany Hills, Kenya dalam merespon marginalisasi yang diakibatkan oleh program NRMP menarik diteliti lebih lanjut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Pustaka

Penelitian mengenai ekologi politik di Kenya pernah dilakukan oleh Paul Ongugo, Jane Njuguna, Emily Obonyo, dan Gordon Sigu (2010) berjudul *Livelihoods, Natural Resource Entitlements and Protected Areas: The Case of Mt. Elgon Forest in Kenya* menjadi karya tulis yang menarik untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Penelitian Paul Ogugo, *et.al.* cukup memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terutama dalam melihat persitegangan antara komunitas adat dengan pemerintah yang berkaitan dengan program konservasi lingkungan. Paul Ogugo, *et.al.* pun melakukan penelitian di Kenya, hanya saja dengan tempat dan kasus yang berbeda. Tujuan penelitian Paul Ogugo, *et.al.* adalah untuk melihat hubungan antara komunitas adat di Mt. Elgon yang telah bertahun-tahun bergantung pada hutan sebagai tanah leluhur mereka dengan pemerintah Kenya (dalam hal ini Departemen Kehutanan).

Penelitian Paul Ongugo, *et.al.* menunjukkan bahwa masyarakat lokal di Mt. Elgon sering bertentangan dengan pihak Departemen Kehutanan karena aturan-aturan yang tidak berpihak pada masyarakat. Paul Ongugo, *et.al.* menyimpulkan, dalam kasus Mt. Elgon, Departemen Kehutanan tidak bertanggungjawab dalam mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat atas hutan dalam jangka waktu yang panjang. Sementara masyarakat lokal menganggap ketergantungan terhadap hutan sebagai hak mereka, Departemen Kehutanan menganggap bahwa itu merupakan hak hukum mereka. Paul Ongugo, *et.al.* juga mendapatkan bahwa masyarakat

adat di Mt. Elgon tidak memiliki akses yang memadai dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Hal itu menyebabkan pada tahun 2005 terjadi bentrokan oleh masyarakat adat di Mt. Elgon karena penggusuran dilakukan oleh Departemen Kehutanan yang juga menyebabkan kematian beberapa masyarakat adat di sana.

Pandangan masyarakat adat di Mt. Elgon berubah terutama karena hak atas kawasan tersebut pernah menjadi milik masyarakat setempat, namun kemudian dilembagakan oleh pemerintah. Masyarakat setempat memiliki respon negatif terhadap konservasi strategi pemerintah. Hal ini yang membuat konflik antara kedua pihak semakin meningkat. Paul Ongugo, *et.al.* kemudian menyimpulkan pemerintah hanya dapat berhasil dalam melakukan konservasi jika masyarakat lokal memahami kepentingan masing-masing. Untuk itu, ada kepentingan bagi kedua pihak untuk bekerjasama dalam pengelolaan hutan. Ini juga yang luput diperhatikan pemerintah dalam kasus Mt. Elgon.

Penelitian Paul Ongugo, dkk. memiliki relevansi dengan penelitian penulis terutama karena perbedaan persepsi konservasi antara pemerintah dengan masyarakat adat. Akan tetapi, penelitian Paul Ongugo, dkk. hanya melihat ketegangan terkait pengelolaan hutan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini adalah melihat perjuangan masyarakat adat Sengwer yang dihubungkan dengan konsep gerakan sosial baru – dengan analisis yang lebih umum terkait ekologi politik di negara berkembang.

Selanjutnya, tulisan tentang bagaimana masyarakat atau komunitas sosial menyikapi isu ekologi di Kenya pernah ditulis oleh MacKenzie (1998) dalam bukunya berjudul *Land, Ecology and Resistance in Kenya*. Mackenzie meneliti dialektika perbaikan ekologi di Kenya dan dampak sosialnya terhadap masyarakat Afrika. Melalui buku ini, tujuan khusus yang ingin dicapai Mackenzie adalah untuk menguji antagonisme kelas dan jenis kelamin yang muncul atas wacana perbaikan ekologi tersebut. Hal itu disampaikan pada bagian pertama buku ini, yaitu mencuatnya isu gender terutama ketika pemberontakan perempuan meletus pada 14 April 1948 di Distrik Muranga, Kenya. Pemberontakan itu dilakukan untuk memprotes penggunaan

tenaga kerja dipaksa untuk tindakan konservasi tanah negara.

Tiga bab pertama meneliti peran perempuan di Muranga, Kenya Pusat, di era pra-kolonial sebagai penggarap pertanian primer; dan bagaimana peran ini berubah ketika Inggris mulai mendefinisikan hukum adat. Hak pra-kolonial atas tanah yang dinamis dan kompleks, meninggalkan ruang untuk negosiasi hak-hak perempuan atas tanah. Redefinisi hukum tanah adat oleh Inggris secara efektif telah menekan hak-hak perempuan atas tanah. Meskipun perempuan yang sebelumnya bisa secara teknis tidak memiliki tanah, hak mereka atas tanah dijamin melalui pengakuan dari nilai mereka sebagai peladang

Masuknya pengetahuan Barat terkait pertanian telah menempatkan praktek pertanian tradisional sebagai tidak ilmiah. Karena kebiasaan masyarakat menempatkan perempuan sebagai pengelola tanah pertanian di Afrika, pengetahuan Barat justru mensyaratkan pembungkaman suara perempuan. Kampanye perbaikan ekologi ketika itu mengurangi status perempuan sebagai penggarap utama tanah dan penjaga pengetahuan pertanian. Pemerintahan kolonial Inggris berusaha untuk menentukan hukum tanah adat yang lebih jelas, dengan mata ke arah perumusan kebijakan. Upaya ini menghasilkan sistem pengelolaan tanah pertanian menjadi kaku dan statis. Akibatnya, sistem hukum adat justru melemahkan posisi perempuan dan kaum miskin oleh para petani kaya atau "Big Men". Upaya Inggris untuk menentukan hukum tanah adat memperburuk ketegangan yang mendasari sistem tanah adat. Akibatnya, kampanye perbaikan ekologi diartikulasikan lewat metode yang melibatkan pengetahuan atau teknik Barat.

Buku ini memberikan gambaran bahwa permasalahan ekologi di Kenya merupakan masalah sejak era kolonial. Demikian juga ketegangan masyarakat (adat) dengan pemerintah terkait manajemen pengelolaan lahan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Gerakan Simbolik Kultural dan Masyarakat Adat**

Gerakan simbolik kultural adalah salah satu bentuk gerakan sosial baru (GSB) (Trijono,

2006). Gerakan simbolik kultural sebagai salah satu bentuk GSB secara operasional muncul sebagai respon atas perubahan nilai atau asas dasar dalam suatu masyarakat. Kurniawan dan Puspitosari (2012) menjelaskan, dalam GSB terdapat keaburan kekuatan kolektivitas sehingga gerakannya menjadi tersegmentasi. Itulah yang menyebabkan gerakan simbolik kultural tidak selalu bersifat terbuka, dalam artian tidak selalu identik dengan adanya mobilisasi massa (Triyono, 2006).

Salah satu kelompok masyarakat yang mengambil peran dalam aktivitas gerakan adalah masyarakat adat. Dalam politik, suara masyarakat adat sering diabaikan dalam struktur sosial yang lebih tinggi. Hal itu terutama disebabkan oleh kurangnya keterwakilan dan partisipasi politik, kemiskinan dan marginalisasi ekonomi, kurangnya akses pelayanan sosial; dan diskriminasi (IPF, 2013). Masalah umum itu juga terkait dengan perlindungan hak-hak mereka. Oleh karena itu, gerakan simbolik kultural yang dilakukan masyarakat adat pada dasarnya adalah untuk pengakuan identitas mereka, cara hidup mereka dan hak mereka atas tanah adat, wilayah dan sumber daya alam.

### **2.2.2 Marginalisasi akibat Pembangunan**

Harrison (1988) membagi marginalisasi yang diakibatkan oleh pembangunan menjadi dua; yaitu marginalisasi secara struktural dan kultural. Secara struktural, pemerintahan domestik dalam sebuah negara telah menjadi agen untuk menciptakan pasar kapitalis melalui program-program pembangunan. Di sini, pemerintah (negara) dapat menggunakan perangkat atau aparatus pendukungnya serta melalui kebijakan-kebijakan atau implementasi dari sebuah kebijakan. Dalam kasus-kasus tertentu, pemerintah bahkan didukung oleh kekuatan supranasional yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu; seperti sistem kapitalisme global. Hal ini menunjukkan relasi kuasa nasional (negara) dan supranasional (sistem kapitalisme global) akan membawa kelompok-kelompok masyarakat tertentu menjadi termarginalisasi. Sedangkan secara kultural, masyarakat telah dihegemoni oleh konsep-konsep pembangunan yang materialistik dengan menjanjikan modernisasi dan kesejahteraan ekonomi.

Jean Pierre dan Oliver de Sardan (2005) melihat perubahan sosial telah menunjukkan adanya pertentangan berbagai logika sosial yang membayangi program-program pembangunan. Dampaknya, budaya dan nilai-nilai lokal masyarakat yang menjadi objek pembangunan, terpaksa menerapkan sesuatu yang bukan menjadi nilai mereka. Inilah awal dari munculnya marginalisasi akibat pembangunan, yaitu masyarakat lokal telah kehilangan pandangan partikularitasnya.

### **2.2.3 Konservasi Alam Berbasis Developmentalisme**

Menurut D'Andrea (2013), konservasi modern secara umum memiliki paradigma bahwa tujuan konservasi adalah menyediakan suatu bentang alam yang digunakan untuk melestarikan hewan-hewan dan atau tumbuhan dan atau ekosistem yang rentan dan dianggap akan punah. Tahun 1990-an, terbentuk lembaga supranasional yang dirancang untuk mengatur investasi lingkungan secara internasional dan arus lintas batas sumber daya alam, termasuk pengetahuan tentang alam dan informasi genetik (McAfee, 1999). Perkembangan ilmu konservasi tersebut diiringi dengan perjanjian-perjanjian internasional mengenai lingkungan, seperti Framework Convention on Climate, Change and the Convention on Biological Diversity (CBD), dan the Global Environment Facility.

Perubahan paradigma konservasi modern disertai juga dengan penggunaan pengetahuan modern dengan teknik-teknik modern pula. Sehingga, metode konservasi tradisional dianggap tidak ilmiah, dan karena itu mulai banyak ditinggalkan. Selain itu, konservasi modern ini menjanjikan masalah lingkungan dapat dijamin melalui solusi pasar dengan paradigma eco-ekonomi. Pendekatan yang demikian menunjukkan konservasi alam yang berbasis developmentalisme (McAfee, 1999).

Pendekatan konservasi berbasis developmentalisme mencerminkan upaya aktor kapitalis untuk mengatasi hambatan yang diakibatkan, misalnya, oleh iklim yang tidak stabil. Artinya, konservasi berbasis developmentalisme mencoba merasionalisasi praktik industri dan perhitungan biaya kerusakan ekologis, tanpa mengurangi keuntungan. Pendukung dari metode ini menyerukan berbagai dana, keringanan pajak,

dan insentif lainnya dengan cara mensubsidi negara-negara, memperkenalkan program-program pembangunan global, dan teknologi hijau (McAfee, 1999).

#### **2.2.4 Teori Ekologi Politik di Negara Berkembang**

Menurut Bryant & Bailey (1997), tujuan utama penelitian ekologi politik di negara berkembang adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara kesejahteraan ekonomi, proses politik, dan degradasi lingkungan. Bryant & Bailey (1997) kemudian menegaskan degradasi lingkungan terjadi bukan karena faktor alami, melainkan menyangkut aktivitas-aktivitas ekonomi dan politik yang dilakukan manusia.

Bryant & Bailey (1997) menjelaskan, di negara berkembang kerusakan lingkungan berkaitan dengan tiga hal. Pertama, terdapat marginalisasi kelompok-kelompok sosial tertentu, biasanya komunitas-komunitas yang mendiami suatu ruang tertentu. Kedua, kondisi sosial ekonomi akan rentan karena berlangsungnya kerusakan yang terus menerus. Ketiga, muncul resiko kehancuran taraf lanjut bagi kehidupan masyarakat di lingkungan yang mengalami kerusakan. Ketiga hal itu kemudian yang menjadi alasan pentingnya melakukan perjuangan politik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kajian ekologi politik, perjuangan politik itu juga bertujuan untuk membongkar relasi kuasa yang berpengaruh terhadap pemecahan permasalahan lingkungan, terutama di negara dunia ketiga.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bungin (2012), metode penelitian kualitatif berangkat dari tradisi berpikir induktif, yaitu “menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu”. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian untuk dijawab melalui pemahaman, bukan dengan hipotesis, karena esensi dari penelitian kualitatif adalah memahami suatu fenomena, bukan membuktikan suatu fenomena (Herdiansyah, 2010). Oleh karena itu, tulisan ini mencoba

memahami gerakan simbolik kultural masyarakat adat Sengwer merespon marginalisasi terkait penerapan program NRMP di Cherangany Hills, Kenya.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Penelitian**

#### **4.1.1 Masyarakat Adat Sengwer dan Cherangany Hills**

Cherangany Hills merupakan dataran tinggi bergelombang di tepi barat Lembah Rift, Kenya yang menjadi salah satu kawasan yang didiami oleh salah satu kelompok masyarakat adat di Kenya, yaitu Sengwer. Dari 95.600 ha luas dataran ini, 60.500 ha merupakan kawasan yang tertutup oleh hutan dan sisanya terdiri dari hamparan bambu, tanah berbatu, padang rumput, dan tanah untuk perkebunan dan budidaya (Kenrick, 2014). Kawasan ini juga menjadi salah satu dari lima daerah utama tangkapan air di Kenya yang letaknya sangat strategis, yaitu di antara Danau Victoria dan cekungan Danau Turkana.

Menurut sensus tahun 2009, tercatat total populasi komunitas Sengwer sebanyak 33.187 orang tersebar di dalam maupun sekitar hutan Cherangany Hills (Tickle, 2014). Oleh masyarakat sekitar, Sengwer juga dikenal dengan sebutan Dorobo. Sengwer berbatasan dengan beberapa kelompok masyarakat dari daerah Nandi, Pokot, Marakwet, Maasai, Keiyo, Karamoja, Kony, dan Sebei. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan tetangga mereka, termasuk berinteraksi bertukar komoditas seperti kayu, madu, daging kering, dan tanaman pangan secara barter.

Laporan *World Rainforest Movement* (2002) menunjukkan masyarakat adat Sengwer memiliki sedikit akses atau bahkan tidak ada perwakilan dalam pemerintahan lokal atau nasional. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh *The Sengwer Indigenous Development Project* (2002), tingkat melek huruf masyarakat adat Sengwer hanya sekitar 1%. Sebagai minoritas yang termarginalkan, Sengwer juga tidak mendapat manfaat dari kebijakan tanah dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah telah mengambil bagian dari tanah leluhur Sengwer dan dikonversi menjadi kawasan konservasi tanpa persetujuan dari masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak mendapatkan keuntungan

atau persentase apapun dari kebijakan tersebut.

#### 4.1.2 Penerapan Program NRMP di Cherangany Hills, Kenya

Tingkat deforestasi yang tinggi di negara-negara berkembang menjadi latar belakang teretusnya program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD). REDD bermaksud untuk menciptakan nilai keuangan melalui karbon yang tersimpan di hutan, menawarkan insentif bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi dari lahan hutan dan berinvestasi di jalur rendah karbon untuk pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kenya mengadopsi program REDD melalui program turunan yang disebut *Natural Resource Management Project* (NRMP) dan difokuskan di Cherangany Hills. Sebagai turunan dari skema global REDD, penerapan NRMP di Cherangany Hills, Kenya melibatkan Bank Dunia sebagai penyandang dana. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Bank Dunia pada tahun 2014, Bank Dunia bekerja sama dengan pemerintah Kenya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan pangan dan energi, mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesehatan, dan membantu melindungi lingkungan yang memberi prospek pengembangan yang lebih baik untuk semua warga Kenya ([www.worldbank.org](http://www.worldbank.org), 2014).

Adapun lima alasan Bank Dunia masuk ke Kenya terkait program NRMP tertuang dalam *Implementation Completion and Result Report* (IDA-42770 TF-93520) yang dirilis tahun 2014. Kelima alasan tersebut meliputi: pertama, Kenya dianggap memiliki endowment terbatas yaitu hanya 647m<sup>3</sup> per kapita per tahun. Kedua, curah hujan tahunan sangat bervariasi dan berubah-ubah setiap tahunnya sehingga perlu dilakukan upaya konservasi hutan. Ketiga, sungai-sungai utama Kenya berasal dari lima daerah pegunungan berhutan tertentu yang disebut sebagai "Lima Menara" dan salah satunya adalah Cherangany Hills. Keempat, hampir 80% wilayah Kenya gersang atau setengah gersang, di mana air tanah menjadi satu-satunya atau sumber air tawar utama. Kelima, lebih dari setengah sumber air Kenya yang dibagi dengan tetangganya, membutuhkan manajemen lintas batas. Dengan

diterapkannya program NRMP, kelima permasalahan itu diharapkan dapat dimanajemen dengan baik.

Selain itu, laporan Bank Dunia (2014) terkait program NRMP di Kenya juga mencantumkan empat kebijakan perlindungan Bank Dunia. Pertama, kebijakan perlindungan Bank Dunia terhadap habitat alami. NRMP akan memajemen konversi atau degradasi hutan yang terjadi secara langsung maupun tidak. Kedua, perlindungan kehutanan. Bank Dunia membantu Pemerintah Kenya terkait NRMP untuk memanfaatkan potensi hutan dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, mengintegrasikan hutan secara efektif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, melindungi nilai-nilai lokal maupun global terkait *environmentalism* dan perlindungan hutan – yaitu dengan mendukung pendekatan hutan berbasis masyarakat.

Ketiga, kebijakan perlindungan Bank Dunia terkait sumber budaya fisik. Di daerah yang dicakup oleh proyek NRMP, ada sejumlah situs agama dan budaya yang bisa terpengaruh oleh proyek tersebut. Sehingga, dalam penerapannya, program NRMP menjamin perlindungan terhadap sumber daya budaya fisik. Keempat, kebijakan perlindungan Bank Dunia terhadap masyarakat adat. Ada sejumlah kelompok suku di daerah penerapan program konservasi ini yang bisa terpengaruh secara positif maupun negatif terhadap keberadaan mereka. Jenis-jenis tindakan yang bisa memicu perlindungan ini termasuk perubahan hak akses ke kawasan hutan, perubahan penggunaan daerah peka budaya (misalnya situs pemakaman); atau pemukiman masyarakat adat yang berada di lingkungan yang sensitif ke lokasi lain.

Huffington Post melalui sebuah artikel di websitenya ([project.huffingtonpost.com](http://project.huffingtonpost.com)) menyebutkan Kelompok Bank Dunia mendanai ratusan proyek pemerintah dan perusahaan setiap tahun. Proyek-proyek tersebut disebut sebagai upaya mengejar misi ambisius yaitu untuk memerangi kemiskinan dengan mendukung sistem transit baru, pembangkit listrik, bendungan, pelayanan sosial, dan berbagai proyek lainnya dipercaya dapat membantu meningkatkan nasib orang miskin. Artikel ini juga mengungkapkan antara tahun 2004 dan 2013, Bank Dunia berkomitmen untuk meminjamkan atau memberikan setidaknya \$

338.000.000.000. Bantuan tersebut memang dinilai telah membawa air bersih dan listrik ke desa-desa terpencil. Tetapi, banyak dari investasi ambisius tersebut menyebabkan jutaan rumah masyarakat lokal tergusur, tanah mereka diambil, dan mata pencaharian mereka terganggu.

#### **4.1.3 Marginalisasi terhadap Masyarakat Adat Sengwer**

Penerapan program NRMP sejak tahun 2007 mengakibatkan terjadinya penggusuran terhadap masyarakat adat Sengwer di Cherangany Hills, Kenya. Penggusuran dilakukan dengan membakar rumah-rumah warga Sengwer di bawah pengawasan *Kenya Forest Service* yang dibantu oleh aparat keamanan Kenya. Menurut catatan FPP (2014) dan juga beberapa media lokal dan internasional mengungkapkan, penggusuran itu tidak hanya menyasar rumah-rumah warga Sengwer, tetapi juga pakaian, makanan, dan harta benda lainnya. Hal tersebut menyebabkan peningkatan risiko kesehatan, kemiskinan, dan akses pendidikan yang semakin sulit karena pembakaran mengakibatkan rumah, seragam sekolah, buku teks, dan hilangnya penghasilan untuk membayar biaya sekolah (FPP, 2014)

Laporan IWGIA (2014) mengungkapkan Pemerintah Kenya telah melanggar empat hal. Pertama, Pemerintah Kenya mengklaim penggusuran terhadap masyarakat adat Sengwer adalah dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati hutan. Padahal, dalam laporan final *Environmental and Social Management Framework* untuk program NRMP yang dibuat tahun 2006 telah memastikan bahwa penerapan program NRMP tidak akan mengorbankan masyarakat adat, dan justru akan melindungi hak-hak atas tanah leluhur mereka:

*“There are a number of tribal groups in both project areas that, consistent with the revised Indigenous Peoples Safeguards, would be characterised as Indigenous Peoples. Therefore as both projects have the potential to impact both positively and negatively on these groups, this safeguard is triggered in both instances. While there are varying degrees to which the different groups in the project areas satisfy the characteristics as outlined in the safeguard policy, there are nevertheless distinct cultures and traditions*

*that need to be carefully considered prior to implementing an initiative.”*

Kedua, Pemerintah Kenya mengatakan telah memberikan kompensasi untuk warga Sengwer yang rumahnya tergusur. Konstitusi Kenya memperbolehkan pemerintah mengambil lahan masyarakat adat, asalkan dengan persetujuan masyarakat adat bersangkutan. Selain itu, sebelum lahan diambilalih, pemerintah wajib memberikan sosialisasi dan pemberitahuan terhadap masyarakat lokal. Dalam kasus Sengwer, sosialisasi dan pemberitahuan tersebut belum dilakukan dan persetujuan masyarakat Sengwer belum diberikan. Hal tersebut dapat disimak dalam satu artikel berjudul *Kenya Burn Indigenous People Out of Ancestral Lands* di *ens-newswire.com* yang mengutip salah satu keterangan warga Sengwer:

*“We were not consulted. I heard about it from the chief in October in the market at Tangul. He said names are being listed so I was told to write my name, so I wrote my name and my name not did appear in the list. I do not want the money, I want to stay up here in Embobut (Cherangany Hills) because where you are born and where you go outside there it is not the same.”*

Ketiga, pemerintah Kenya telah gagal dalam melindungi masyarakat adatnya. Marginalisasi terhadap masyarakat adat Sengwer bukan saja akan menghilangkan masyarakatnya, tetapi juga menggerus kebudayaan, nilai, dan sistem pengetahuan adat mereka. Keempat, penggusuran itu tidak hanya melanggar hak-hak masyarakat adat, tetapi juga hak asasi manusia yang lebih luas. Kecuali pada tahun 2012, penggusuran dan pembakaran rumah-rumah warga Sengwer terkait penerapan program NRMP terus berlanjut sampai tahun 2014.

Pasca kemerdekaan Kenya pada 1963, persoalan tanah sering menjadi polemik di masyarakat Kenya. Hal itu disebabkan karena Kenya belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan tanah. Secara resmi Kenya baru mengesahkan perundang-undangan kepemilikan tanah pada tahun 2010 yang sudah dipersiapkan sejak tahun 2005. Akhirnya, pada tahun 2010 pula, masyarakat adat Sengwer yang merupakan

kelompok pemburu-pengumpul mendapat pengakuan secara konstitusional. Kenya mulai menerapkan konstitusi baru tahun 2010 yang menetapkan kepemilikan masyarakat terhadap tanah leluhur secara tradisional (Pasal 63) – termasuk dalam hal ini masyarakat adat Sengwer di Cherangany Hills (FPP, 2013). Mengingat pengakuan secara konstitusional tersebut, masyarakat Sengwer seharusnya tidak sampai menjadi korban pengusuran terkait penerapan program NRMP.

Meskipun telah diakui secara konstitusional, pengusuran dan pembakaran rumah-rumah warga Sengwer tetap berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Padahal, dalam persidangan di pengadilan tinggi di Eldoret, Kenya pada tahun 2013 telah mengeluarkan perintah agar pengusuran itu segera dihentikan. Pengadilan tinggi menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hak-hak terhadap masyarakat adat atas tanah mereka. Akan tetapi, pemerintah Kenya terus mengabaikan putusan tersebut dan menuding orang-orang Sengwer sebagai masyarakat liar (NRAN, 2014). Oleh pemerintah Kenya, Sengwer juga dituduh telah melanggar batas lahan konservasi yang seharusnya tidak menjadi tempat pemukiman warga. Di samping itu, menurut pernyataan NRAN (2014), Pemerintah Kenya juga bersikeras untuk enggan membedakan antara kelompok *Internally Displaced Person* (IDPs) dengan penduduk asli Sengwer di Cherangany Hills. Keengganan pemerintah Kenya inilah yang membuat masyarakat adat Sengwer diperlakukan sama dengan penghuni liar lainnya.

## 4.2 Pembahasan

### 4.1.1 Temuan Penelitian

Kasus pengusuran sebagai dampak penerapan program NRMP ini, tokoh-tokoh adat Sengwer telah melakukan beberapa upaya untuk merespon hilangnya hak-hak mereka sebagai masyarakat adat. Tetapi, sepanjang lokus waktu penelitian ini, upaya-upaya yang telah dilakukan para tokoh masyarakat adat Sengwer tersebut tidak sampai menimbulkan terjadinya bentrokan sebagaimana kasus di Mt. Elgon dan Distrik Murunga. Dengan kata lain, gerakan Sengwer dalam kasus ini belum sampai menjadi gerakan terbuka karena tidak ada mobilisasi massa. Gerakan Sengwer dalam

merespon marginalisasi yang diakibatkan oleh penerapan program NRMP di Cherangany Hills dengan demikian menunjukkan sebuah gerakan simbolik kultural. Menurut Alberto Melucci (dalam Trijono, 2006), sebuah gerakan dalam ranah simbolik kultural tidak selalu bersifat terbuka. Dengan kalimat lain, gerakan sosial baru yang berorientasi kultural hanya kadang-kadang saja termobilisasi dalam arena politik terbuka.

Gerakan masyarakat adat Sengwer dalam merespon marginalisasi akibat penerapan program NRMP di Cherangany Hills Kenya antara lain terkait dengan Pasal 3 Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (Sena, 2010). Artinya, masyarakat adat bebas menentukan status politik, bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Bebas dalam hal ini diartikan positif dalam konteks hidup berdampingan dengan negara; yaitu sebagai katalis untuk partisipasi efektif dalam proses pembangunan negara melalui dialog dan kemitraan. Selain itu, pasal ini juga diterjemahkan sebagai kendaraan untuk mencegah diskriminasi dan mendorong perdamaian.

Dengan demikian, hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut karena setiap masyarakat berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati hasil pembangunan. Akan tetapi, menurut Sena (2010), masyarakat adat di Kenya belum menikmati hak tersebut. Gerakan Sengwer, selain dalam rangka menuntut hak-haknya, dapat juga dimaknai sebagai respon terhadap perubahan nilai yang dialami oleh masyarakat adat Sengwer. Dalam konsep gerakan sosial baru, kesadaran adalah kunci utama berhasil atau tidaknya sebuah gerakan sosial baru (Kurniawan & Puspitosari, 2012). Kesadaran tersebut diawali dengan refleksi pengalaman masyarakat adat Sengwer sebagai kelompok pemburu-pengumpul, yang kemudian ditransformasikan ke dalam agenda aksi.

Dalam konsep gerakan sosial baru, seperti dijelaskan oleh Trijono (2006), keberhasilan sebuah gerakan salah satunya bergantung pada jaringan dan solidaritas kolektif. Penulis menemukan solidaritas dalam gerakan Sengwer juga datang dari arena



internasional. Oleh karenanya, penulis melihat perjuangan masyarakat adat Sengwer dalam merespon marginalisasi akibat proyek NRMP di ranah agenda aksi ke dalam dua bentuk, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal, masyarakat Sengwer telah melakukan dua langkah penting sebagai bentuk gerakan simbolik kultural pasca digusur dan dibakarnya rumah-rumah mereka sejak tahun 2007 yang juga mulai bergulirnya program NRMP di Cherangany Hills, Kenya. Bentuk perjuangan Sengwer yang penulis temukan adalah:

**a. Sengwer Sampaikan Keberatan kepada Panel Inspeksi Bank Dunia**

Pada 14 Januari 2013, anggota komunitas Sengwer menyampaikan keberatannya kepada Panel Inspeksi Bank Dunia bahwa kebijakan operasional Bank Dunia terkait program NRMP telah menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi masyarakat adat Sengwer. Perwakilan Sengwer menjelaskan kepada Panel bahwa mereka kehilangan akses terhadap tanah leluhur mereka, dan terus menghadapi tekanan berat yang bukan hanya terkait tanah leluhur mereka, tetapi juga pada budaya dan identitas mereka.

Menanggapi laporan dari masyarakat adat Sengwer tersebut, Bank Dunia mengeluarkan pernyataan yang intinya Bank Dunia tidak ingin disebut terlibat dalam penggusuran tersebut. Berikut pernyataan Bank Dunia merespon pengaduan Sengwer (seperti dikutip Daniels, 2014):

*“The World Bank is not linked to these evictions and nor has the World Bank ever supported evictions through its development financing of Kenya’s Natural Resources Management Project (NRMP). ... The World Bank stands ready to assist the Government of Kenya with its development advice drawing on its local and global project experiences, and to share best practices in resettlement in line with its safeguard policies.”*

**b. Banding di Pengadilan Tinggi di Eldoret, Kenya**

Selanjutnya, pada 26 Maret 2013, perwakilan Sengwer mengajukan banding ke pengadilan tinggi di Eldoret, Kenya. Perwakilan Sengwer melaporkan bahwa Pemerintah Kenya melalui *Kenya Forest*

*Service* (KFS) telah menggusur dan membakar rumah-rumah warga Sengwer terkait penerapan NRMP. Persidanganpun memutuskan agar pembakaran rumah-rumah warga Sengwer dihentikan. Putusan tersebut berpijak pada pasal 63 konstitusi Kenya tahun 2010 yang mengakui masyarakat adat serta wilayah yang ditempati oleh leluhur mereka sejak turun-temurun.

Akan tetapi, meskipun pengadilan tinggi telah menginstruksikan agar penggusuran terkait program NRMP dihentikan, pemerintah Kenya tidak mengindahkan putusan tersebut. Sebulan setelah pengadilan, yaitu pada bulan April dan Mei 2013 petugas kehutanan dibantu dengan aparaturnya keamanan Kenya kembali melakukan penggusuran dan pembakaran rumah dan harta benda masyarakat adat Sengwer di Cherangany Hills.

Sedangkan, yang penulis maksud langkah secara eksternal adalah terlibatnya kelompok-kelompok di luar komunitas adat Sengwer dalam aktivitas gerakan. Kelompok-kelompok itu tergabung dalam jaringan aktivis lingkungan yang rutin mengadvokasi permasalahan lingkungan hidup dan masyarakat adat. Dengan demikian, jaringan gerakan yang dilakukan masyarakat adat Sengwer dalam memperjuangkan hak-haknya semakin besar. Konsep gerakan simbolik kultural tidak menafikan bahwa sebuah gerakan sosial bergantung pada solidaritas dan kekuatan jaringan (Triyono, 2006). Penulis menemukan setidaknya terdapat empat aktivitas penting yang sejalan dengan gerakan Sengwer dalam menuntut hak-hak mereka sebagai masyarakat adat.

1. Pada Januari 2014, sebanyak 40 organisasi masyarakat sipil termasuk *Global Forest Coalition* dan *Greenpeace Afrika* menandatangani seruan yang mendesak pemerintah Kenya untuk menghentikan penggusuran dan menghormati hak masyarakat adat Sengwer. Salah satu pelapor khusus PBB tentang hak-hak masyarakat adat, James Anaya, mendesak perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Sengwer dengan mengutip Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.

2. Jaringan internasional *Indigenous People Biocultural Climate Change Assessment Initiative* tidak hanya menyerukan pengusuran dan marginalisasi terhadap masyarakat adat Sengwer segera dihentikan. Jaringan ini secara terbuka mengkritik program REDD yang kemudian diturunkan menjadi NRMP di Kenya.

3. *No REDD in Africa Network* (NRAN) secara konsisten bahkan menolak penerapan program REDD di Afrika, termasuk Kenya. Dalam deklarasi yang dirilis NRAN dan ditandatangani oleh sebelas NGO yang berfokus pada isu lingkungan, disebutkan:

*“REDD is a highly controversial emissions reduction scheme that uses forest, plantations and lands in the Global South as carbon offsets and supposed sponges of the fossil fuel carbons and pollution from the Global North.”*

4. Dukungan terhadap masyarakat adat Sengwer juga datang dari *Forest People Program* (FPP) yang berbasis di Inggris. Peran FPP termasuk yang paling gencar menyerukan dukungan terhadap masyarakat adat Sengwer yang termarginalisasi oleh penerapan program NRMP. Hal itu dibuktikan dengan penerbitan laporan perkembangan kasus Sengwer secara berkala oleh FPP sejak pengusuran rumah-rumah warga Sengwer dilakukan. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2013, FPP mengirimkan proposal kepada Presiden Kenya yang berisi usulan terkait penderitaan yang dialami masyarakat adat Sengwer.

Dari bentuk-bentuk gerakan tersebut, gerakan mandiri yang dilakukan masyarakat adat Sengwer belum menjadi sebuah gerakan terbuka. Gerakan Sengwer dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai masyarakat adat baru tumbuh di internal tokoh-tokoh adat Sengwer. Selibuhnya, gerakan simbolik kultural yang dilakukan masyarakat adat Sengwer dalam merespon marginalisasi akibat penerapan NRMP lebih banyak dibantu oleh jaringan aktivis lingkungan di luar Sengwer.

#### 4.1.2 Analisis

##### 4.1.2.1 Adat Sebagai Wacana Gerakan

Dari sudut pandang teori ekologi politik, gerakan masyarakat adat Sengwer dalam merespon marginalisasi yang diakibatkan oleh program NRMP menunjukkan adanya perlawanan terhadap hegemoni pembangunan modern. Adapun pertarungan wacana yang kontras dalam kasus marginalisasi terhadap masyarakat Sengwer terkait penerapan program NRMP yaitu terkait dengan teritorialisasi menurut paham konservasi modern. Di mana, negara modern (pemerintah Kenya) menerapkan otoritas dan mendefinisikan bukan hanya perbatasan nasional, tetapi juga atas orang dan sumberdaya di dalam wilayah nasional. Teritorialisasi oleh Pemerintah Kenya inilah yang menyebabkan masyarakat adat di Kenya, khususnya Sengwer, termarginalisasi. Gerakan simbolik kultural masyarakat adat Sengwer yang mengedepankan “hak untuk masyarakat adat” telah mempertentangkan pengakuan terhadap suatu bentang alam (Cherangany Hills) berdasarkan keyakinan mereka sebagai warisan leluhur dengan inisiatif Pemerintah Kenya yang merelokasi mereka dengan alasan konservasi.

Sebagai sebuah gerakan sosial baru, gerakan simbolik kultural Sengwer dalam merebut hak-haknya sebagai masyarakat adat pada dasarnya menyangkut tiga agenda perubahan; yaitu perubahan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. *Pertama*, perubahan secara politik dalam sebuah gerakan sosial berarti *“mengembalikan kekuasaan pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui mekanisme demokrasi agar dapat melahirkan pemerintahan yang representatif, aspiratif, demokratis dan berkualitas”* (Kurniawan & Puspitosari, 2012). Gerakan yang dilakukan masyarakat adat Sengwer menunjukkan adanya gugatan masyarakat terhadap negara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sejak merdeka dari kolonialisme Inggris pada tahun 1963, banyak persoalan politik yang belum terselesaikan di Kenya. Persoalan lahan dan tanah telah berulang kali terjadi di Kenya.

Dalam penerapan program NRMP di Cherangany Hills, pemerintah Kenya telah mengabaikan tujuan politiknya yaitu mewujudkan sistem demokrasi yang berakar pada masyarakat (Kenrick, 2014). Seperti tahun 2005, akuisisi lahan di Mt. Elgon Kenya oleh pemerintah Kenya juga menyebabkan

terjadinya bentrokan antara masyarakat adat di kawasan tersebut dengan pemerintah (Ongugo, 2010). Masyarakat adat di Mt. Elgon Kenya menganggap bahwa kawasan tersebut merupakan tanah leluhur mereka yang sudah sejak lama menjadi tempat mereka bergantung. Akan tetapi, seperti dalam kasus Sengwer, pemerintah Kenya beralasan tanah tersebut adalah hak hukum mereka. Terlepas dari itu, gerakan Sengwer menunjukkan masyarakat adat bukan lagi kelompok masyarakat statis dan menerima segala keputusan di luar komunitas mereka. Pandangan D'Andrea (2013) menarik untuk melihat perubahan masyarakat adat dari yang sebelumnya dianggap statis menjadi lebih dinamis. Gerakan Sengwer dengan demikian telah menunjukkan bahwa sebagai masyarakat adat, mereka juga harus dipandang sebagai subjek – kendati dalam gerakannya lebih banyak melibatkan jaringan aktivis lingkungan di luar komunitas mereka.

*Kedua*, perubahan secara ekonomi. Sebelum program NRMP diberlakukan di kawasan Cherangany Hills oleh pemerintah Kenya, masyarakat adat Sengwer menjalankan kehidupannya dengan berburu dan melakukan barter dengan komunitas-komunitas yang berbatasan dengan mereka. Penggusuran menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat adat Sengwer semakin terpuruk. Selain rumah-rumah mereka, pakaian dan toko-toko makanan di kawasan Cherangany Hills juga dibakar oleh otoritas Kenya.

Kanyinke Sena (2010) dalam makalahnya berjudul *Africa Indigenous Peoples: Develepment with Culture and Identity* menilai isu perubahan iklim yang gencar dikampanyekan di arena internasional memiliki dampak negatif bagi masyarakat adat di Afrika. Program konservasi global seperti REDD dan NRMP sebagai turunan domestiknya telah menghancurkan basis ekonomi masyarakat adat Sengwer. Menurut Sena (2010), kemiskinan menjadi masalah serius meskipun kenyataannya masyarakat adat memiliki tanah, wilayah dan sumber daya, kelimpahan pengetahuan tradisional, serta berbagai keterampilan lain yang sebenarnya dapat mendatangkan keuntungan finansial.

*Ketiga*, perubahan sosial-budaya. Salah satu alasan Bank Dunia melakukan investasi terkait program NRMP di Kenya adalah membantu masyarakat di sekitar hutan

Cherangany menjadi lebih sejahtera dan lebih baik secara ekonomi. Tujuan yang demikian merupakan pendekatan umum dalam wacana pembangunan. Tetapi, dalam pendekatan kritis, pendekatan pembangunan tersebut justru mengabaikan banyak hal. Masyarakat Sengwer nyatanya termarginalisasi secara struktural dan kultural. Secara struktural, Sengwer telah mengalami perubahan sosial yang membuat mereka terpuruk terlebih dengan penggunaan aparatus negara dalam melakukan penggusuran. Sedangkan secara kultural, konsep konservasi modern, perbaikan ekonomi, politik, budaya, dan infrastruktur telah dijadikan wacana utama dalam penerapan program NRMP.

#### **4.1.2.2 Gerakan Sengwer sebagai Kritik terhadap Program Konservasi Global (NRMP – REDD)**

Chamsar (2006) menyebutkan di era pembangunan, upaya mendominasi negara lain dilakukan melalui infiltrasi modal asing dan penguasaan aset dengan dukungan dan penerapan teori pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Marginalisasi terhadap masyarakat adat Sengwer yang diikuti dengan protes secara internal maupun eksternal Sengwer menunjukkan pemerintah Kenya telah tutup mata terhadap kedaulatan rakyatnya. Pada saat bersamaan, pemerintah Kenya tetap menjalankan skema konservasi global REDD melalui NRMP yang didanai Bank Dunia.

Gerakan simbolik kultural masyarakat adat Sengwer terkait respon terjadinya marginalisasi akibat program NRMP juga menjadi ajang kritik terhadap program konservasi global. Kritik-kritik itu bukan saja ditujukan untuk menghentikan marginalisasi terhadap masyarakat adat Sengwer, tetapi juga untuk berusaha membatalkan skema konservasi tersebut. Pada tahun 2013, Anabela Lemos, pendiri dan direktur Justica Ambiental telah memperkirakan bahwa proyek REDD hanya akan menyebabkan perpindahan masyarakat, perbudakan, pembunuhan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Konsekuensi-konsekuensi yang dikibatkan oleh penerapan program NRMP dengan demikian memungkinkan terakomodirnya kepentingan ekonomi global untuk mencari keuntungan dari perampasan tanah masyarakat adat dan hak asasi manusia.

Kritik berikutnya menyatakan bahwa proyek-proyek REDD tidak menawarkan solusi konkrit perubahan iklim. Kritik ini menganggap bahwa skema konservasi global ini telah muncul sebagai bentuk baru kolonialisme, penaklukan ekonomi, dan perampasan hak-hak masyarakat adat. NRAN menyebut REDD sebagai “penjajahan karbon”.

Kritik terhadap penerapan program konservasi global di negara berkembang dapat dikaitkan dengan konsep pembangunan (developmentalisme). Selain sebagai upaya melindungi hutan – sebagaimana disebutkan dalam lembar draft proyek Bank Dunia – penerapan NRMP juga sebagai upaya membantu memperbaiki perekonomian masyarakat adat di sekitar Cherangany Hills. Sayangnya, tujuan baik itu justru menyebabkan mereka dalam keadaan termarginal.

Menurut Wallerstein seperti dikutip Boynd (2013), kekuatan dinamis dari kapitalis yang mendorong perkembangan ekonomi di negara-negara inti juga menghasilkan keterbelakangan di negara-negara periferi. Wallerstein berasumsi bahwa kemajuan negara inti tetap memerlukan keberadaan negara berkembang di periferi. Lebih jauh Wallerstein berargumen bahwa kerjasama yang dibangun negara-negara di sentral dan periferial secara mekanistik saling terkait satu sama lain sedemikian rupa; dan pada saat bersamaan, surplus ekonomi pada negara periferi akan ditransfer ke negara sentral.

Penerapan program konservasi REDD melalui NRMP di Cherangany Hills, Kenya telah menunjukkan masalah lingkungan yang kompleks. Hal ini sejalan dengan teori ekologi politik negara berkembang yang tidak mau memisahkan kerusakan lingkungan dengan kepentingan-kepentingan lain seperti ekonomi-politik. Kritik terhadap program konservasi global seperti REDD telah menunjukkan secara jelas bahwa negara-negara industri telah melimpahkan tanggung jawabnya terhadap perubahan iklim kepada negara-negara berkembang. Pelimpahan tanggung jawab tersebut juga menjelaskan bahwa kemajuan di negara inti menyebabkan masalah lain di negara berkembang – seperti kasus Sengwer yang termarginalisasi ditanah leluhurnya.

## 5. KESIMPULAN

Gerakan simbolik kultural masyarakat adat Sengwer dalam merespon marginalisasi terkait penerapan NRMP, karena belum menjadi gerakan terbuka, memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Tantangan itu misalnya penegakan hukum di Kenya yang masih lemah. Meskipun keberadaan Sengwer dan Cherangany Hills sudah diakui secara konstitusional, tetapi setahun setelah pengadilan tinggi di Eldoret memutuskan itu, pengusuran dan marginalisasi terkait program NRMP masih tetap berlangsung.

Hooghe (dalam Ishyama & Breuning (ed.), 2013) menulis gerakan sosial yang sukses akan tergantung pada kesempatan yang diciptakan atau ditawarkan oleh sistem politik. Hal ini disebabkan karena otoritas atau elit politik dapat saja memfasilitasi atau menumpas manifestasi gerakan sosial – yang berujung pada sukses tidaknya agenda yang diperjuangkan. Dari perjalanan panjang sejarah Kenya, budaya politik yang memadai tampak belum terwujud, terutama masih banyaknya kasus-kasus diskriminasi terhadap masyarakat adat. Selain itu, sebagai minoritas, Sengwer juga tidak memiliki representasi politik yang memadai di kekuasaan.

Penelitian ini paling tidak telah berusaha menunjukkan bahwa adat telah menjadi wacana penting dalam gerakan yang dilakukan masyarakat adat Sengwer. Hal ini mengemuka karena gerakan simbolik kultural Sengwer sebagai gerakan sosial baru telah diawali dengan refleksi pengalaman praktis berdasarkan pengalaman historisnya sebagai kelompok masyarakat pemburu-pengumpul. Sehingga, begitu menghadapi perubahan yang membuat masyarakat adat Sengwer termarginalisasi, wacana hak-hak masyarakat adat dikedepankan.

Gerakan simbolik kultural yang dilakukan masyarakat adat Sengwer bermuatan kritik terhadap program konservasi modern, khususnya program NRMP sebagai penjabaran domestik dari skema REDD. Kritik-kritik tersebut menunjukkan masalah ekologi yang kompleks, yaitu tidak hanya terkait kerusakan lingkungan, tetapi juga terkait dengan kepentingan ekonomi-politik bahkan masalah-masalah kemanusiaan yang lebih luas.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Bryant, R. L. & Bailey, S. (1997). *Third world political ecology*. London: Routledge.
- Boynd, F.A. (2013). *Ketertarikan dan pembangunan*. Dalam Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21 Jilid 1. Jakarta: Kencana.
- Bungin, B. (2012). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Center for International Forestry Research (CIFOR). (2010). *REDD: Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang hutan, perubahan iklim dan REDD*. Bogor: CIFOR.
- Chamsar, R. (2006). *NGO dan jalan kesesatan global*. dalam Kata & Luka Kebudayaan: Isu-isu Gerakan Kebudayaan & Pengetahuan Kontemporer. Medan: USU Press.
- D'Andrea, C.F. (2013). *Kopi, adat, dan modal teritorialisasi dan identitas adat di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah*. Tanah Air Beta, Yayasan Tanah Merdeka dan Sajogyo Institute.
- Dharmawan, A.H. (2007). *Dinamika sosio-ekologi pedesaan: perspektif dan pertautan keilmuan ekologi manusia, sosiologi lingkungan, dan ekologi politik*. Dimuat dalam Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia Vol.1/No.1, April 2007.
- Diehl, P.F. & Gleditsch, N.P. (2001). *Environmental conflict*. Westview Press.
- Fakih, M. (2011). *Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press & Pustaka Pelajar.
- Foryst, T. (2007). *Political ecology and the epistemology of social justice*. London: Elsevier Ltd.
- Harrison, D. (1988). *The sociology of modernization and development*. London: Routledge.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ishiyama, J. T. & Breuning, M. (editor). (2013). *Ilmu politik dalam paradigma abad ke-21: sebuah referensi panduan tematis (jilid 1)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Johnson, K. R. (2003). *The struggle for civil rights: the need for, and impediments to, political coalitions among and within minority groups*. Dalam Louisiana Law Reviews and Journals Volume 63, Number 3.
- Kenrick, J. (2014). *The case of the Cherangany Hills, Kenya – state forest protection is forcing people from their lands*. Forest People Programme.
- Kurniawan, L. J. & Puspitosari, H. (2012). *Negara, civil society & demokratisasi: membangun gerakan sosial dan solidaritas sosial dalam merebut perubahan*. Malang: IntransPublishing.
- Mackenzie, F. D. (1998). *Land, ecology, and resistance in Kenya*. London: IAI.
- Minority Right Group International. (2015). *State of the world's minorities and indigenous peoples 2015 – Kenya*. MRGI.
- Ongugo, P., Njuguna, J., et.al. (2010) *Livelihoods, Natural Resource Entitlements and Protected Areas: The Case of Mt. Egon Forest in Kenya*. Diakses dari [www.cbd.int/doc/case-studies/for/cs-ecofor-ke-02-en.pdf](http://www.cbd.int/doc/case-studies/for/cs-ecofor-ke-02-en.pdf)
- Pierre, J. & Sardin, O. (2005). *Anthropology and Development*. London: Zed Books.
- Rostow, W. W. (2012). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge University Press.
- Schouten, P. (2008). *Theory Talks: Perbincangan pakar sedunia tentang teor hubungan internasional abad ke-21*. LP3M & PPSK: Yogyakarta.
- Sena, K. (2010). *Africa Indigenous People: Development with Culture and Identity*. Departement of Economic and Social Affairs – Secretariat of Permanent Forum on Indigenous Issues.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Touraine, A. (1981). *The voice and the eye: an analysis of social movement*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Trijono, L. (2006). *Gerakan sosial baru: dari refleksi menuju aksi*. dalam Kata & Luka Kebudayaan: Isu-isu Gerakan Kebudayaan & Pengetahuan Kontemporer. Medan: USU Press.
- United Nation Environment Program. (2012). *The role and contribution of Montane Forests and related ecosystem services to the Kenyan Economy*.
- Yohantin, G.S., Supriyadi, & Wahono, P. (2013). *Konflik internal pasca Pemilu 2007 di Kenya*. UNEJ.

**Website:**

- Abraham, K. S. (2008). *Indigenous People's struggles for recognition of their right*. Diakses melalui <http://www.cetri.be/indigenous-people-s-struggle-for>
- Ahmed, N. (2014). World Bank and UN carbon offset scheme 'complicit' in genocidal land grabs – NGOs. Diakses pada 23 Agustus 2015 di <http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/jul/03/world-bank-un-redd-genocide-land-carbon-grab-sengwer-kenya>
- BBC. (2010). *Presiden Kenya imbau referendum damai*. Diakses pada 23 Agustus 2015 di [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/08/100804\\_kenyavote.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/08/100804_kenyavote.shtml)
- Bretton Woods Project. (2014). *Kenya evictions: foreshadowing future World Bank forest work?* Diakses pada 11 Agustus 2015 di <http://www.brettonwoodsproject.org/2014/01/kenya-evictions-foreshadowing-future-bank-forest-work/>
- Cultural Survival Weekly Indigenous News. (2002). *The Sengwer Indigenous Project*. Diakses di [http://zunia.org/sites/default/files/media/node-files/si/132490\\_SIDP\\_Piece\\_-\\_Nov.\\_22.doc](http://zunia.org/sites/default/files/media/node-files/si/132490_SIDP_Piece_-_Nov._22.doc)
- Daniels, L. (2014). *Kenya's conservation effort evicting Sengwer Tribe from the forest homes*. Diakses di <http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2014/03/22/kenyas-conservation-effort-evicting-sengwer-tribe-from-the-forest-home>
- Diaz, E. (2011). *Latar belakang krisis politik di Kenya pasca Pemilu 27 Desember 2007* (thesis). UPN Veteran Yogyakarta. Diakses di <http://repository.upnyk.ac.id/1393/>
- Ensn-newsire. (2014). *Kenya Burns Indigenous People Out of Ancestral Lands*. Diakses pada 5 Januari 2015 di <http://ens-newsire.com/2014/01/22/kenya-burns-indigenous-people-out-of-ancestral-lands/>
- FPP. (2014). *How the World Bank is implicated today's Embobut evictions*. <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/12/How%20the%20World%20is%20implicated%20in%20today%E2%80%99s%20Embobut%20Evictions.pdf>
- FPP. (2014) *Kenya defies own courts torching homes and forcefully evicting the Sengwer from their ancestral lands, threatening their cultural survival*. Diakses pada 10 Agustus 2015 di <http://www.forestpeoples.org/topics/legal-human-rights/news/2014/01/kenya-defies-its-own-courts-torching-homes-and-forcefully-evi>
- FPP. (2014). *Updated timeline of forced eviction of Sengwer communities*. Diakses pada 17 Juli 2015 di [http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/12/Updated%2520Timeline%2520of%2520forced%2520eviction%2520of%2520Sengwer%2520communities\\_0.pdf&usq=ALkJrhgt3hKWwc7iry8Kd9aNL1llkVz2nA](http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/12/Updated%2520Timeline%2520of%2520forced%2520eviction%2520of%2520Sengwer%2520communities_0.pdf&usq=ALkJrhgt3hKWwc7iry8Kd9aNL1llkVz2nA)
- International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). *Indigenous people in Kenya*. Diakses di <http://iwgia.org/regions/africa/kenya>
- IWGIA (2014). *Kenya: Imminent forced eviction threatens indigenous communities' human rights and ancestral forests*. Diakses pada 20 Agustus 2015 di [http://www.iwgia.org/news/search-news?news\\_id=889](http://www.iwgia.org/news/search-news?news_id=889)
- Jacob, K. Langat, A. et.al. (2015). *World Bank projects leave trail of misery around globe*. Diakses pada 19 Juli 2015 di <http://projects.huffingtonpost.com/worldbank-evicted-abandoned/worldbank-projects-leave-trail-misery-around-globe-kenya>
- Lutz, E.L. (2014). *Recognizing indigenous people's human rights*. Diakses pada 25 November 2015 di <https://www.culturalsurvival.org/publications/voices/australia/recognizing-indigenous-peoples-human-rights>
- Masripatin, N. (2007). *Apa itu REDD?* Diakses pada 10 Januari 2015 di <http://forestclimatecenter.org/files/2007%20Apa%20itu%20REDD.pdf>
- Ndobe, S. N. (2013). *Pengalaman masyarakat adat di Afrika dengan kebijakan perlindungan: teladan dari Kamerun dan Pesisir Kongo*. Diakses di <http://forestpeoples.org/pt-br/node/4359>
- NRMP. (2014) *Forced Relocation of Sengwer People proves urgency of canceling REDD*. Diakses pada 5 Januari 2015 di <http://no-redd-africa.org/index.php/declarations/97-forced-relocation-of-sengwer-people-proves-urgency-of-canceling-redd>

- NRMP. (2014). *Sengwers Feeling the Heat in the Embobut Forest*. Diakses pada 20 Juli 2015 di <http://no-redd-africa.org/index.php/declarations/27-countries/kenya/111-sengwers-feeling-the-heat-in-the-embobut-forest>
- NRMP. (2014). *World Bank accuses itself of failing to protect Kenya forest dwellers*. Diakses pada tanggal 5 Januari 2015 di <http://no-redd-africa.org/index.php/declarations/27-countries/kenya/108-world-bank-accuses-itself-of-failing-to-protect-kenya-forest-dwellers>
- Survival International. *Kenyan Government forcing us into extinction: eviction of Sengwer tribe escalate*. Diakses pada 27 Februari 2015 di <http://www.survivalinternational.org/news/9932>
- Tickell, O. (2014). *Kenya-forest people facing violent eviction*. Diakses melalui [www.theecologist.org/News/news\\_analysis/2230122/kenya\\_forest\\_people\\_facing\\_violent\\_eviction.html](http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2230122/kenya_forest_people_facing_violent_eviction.html) pada 28 Juli 2015.
- United Nations Permanent Forum on indigenous Issues. Who are indigenous people? Diakses pada 20 Februari 2015 di [http://www.un.org/esa/socdev/unpfil/documents/5session\\_factsheet1.pdf](http://www.un.org/esa/socdev/unpfil/documents/5session_factsheet1.pdf)
- World Bank. (2014). *World Bank Statement on Embobut Forest and Cherangany Hills Evictions in Kenya* diakses pada 22 Juli 2014 di <http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/02/06/world-bank-statement-on-embobut-forest-and-cherangany-hills-evictions-in-kenya>
- World Rainforest Movement. (2002). *Community approaches to forest management* (Bulletin) diakses pada 19 Agustus 2015 di <http://www.wrm.org.uy/oldsite/bulletin/65/viepoint.html&usg=ALkJrhhuNdHMiORx2G8U4YfCeQrfVaElg>